

Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998

Dimas Ziqi Prasetiadi^{1*}, Marjono², Sumardi³

^{1,2,3} Pendidikan Sejarah Universitas Jember, Jalan Kalimantan No. 37, Tegalboto, Jember, Indonesia

*e-mail korespondensi: dimasziqi123@gmail.com

Received 08 August 2020; Received in revised form 13 December 2020; Accepted 25 February 2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia tahun 1958-1998. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan langkah sebagai berikut: (1) heuristik, (2), kritik sumber, (3), interpretasi, (4), historiografi. Keterlibatan militer dalam bidang politik di Indonesia juga diakibatkan dari adanya campur tangan parlemen dalam tubuh militer Pada tahun 1952. Konflik ini menjadi isu politik di parlemen yang memancing munculnya serangkaian mosi tidak percaya yang menginginkan reorganisasi dalam tubuh militer. Akibatnya militer merasa urusannya dicampuri oleh parlemen. Sehingga pada tanggal 17 Oktober 1952 para anggota militer melakukan demonstrasi di gedung parlemen. Peran militer semakin terlihat dalam politik pemerintahan setelah Indonesia menerapkan Undang-Undang Darurat Perang (S.O.B) pada tahun 1957. Militer memiliki dasar pijakan untuk ikut terlibat dalam politik pemerintahan ketika gagasan mengenai konsep Jalan Tengah Nasution diterima oleh Soekarno. Hal ini membuat militer berhasil menduduki posisi dalam politik pemerintahan seperti kabinet, badan legislatif, dan jabatan-jabatan strategis. Dampak dari hadirnya golongan militer dalam politik pemerintahan ialah pada keadaan stabilitas politik Indonesia. Militer membentuk sekber Golkar untuk menyaingi partai PKI. Sedangkan dalam stabilitas Pertahanan dan keamanan. Militer melakukan pemutusan hubungan diplomatic denga Cina.

Kata kunci: pemerintahan, militer, politik

Abstract

This research inteded to military involvement in Indonesian Goverment Politics in 1558-1998. The methode of this research was historic method by using steps, (1) heuristics, (2) resource critics, (3) interpretations, (4) historiography. The results of the research: Military involvement in politics in Indonesia also resulted from the intervention of parliament in the military body. In 1952. This conflict became a political issue in parliament which provoked a series of no-confidence motions that wanted reorganization within the military. As a result the military felt its affairs were interfered with by the parliament. So on October 17, 1952 members of the military held a demonstration in the parliament building. The role of the military was increasingly seen in government politics after Indonesia implemented the Law on Martial Law (S.O.B) in 1957. The military had a foothold to get involved in government politics when the idea of the concept of the Middle Road Nasution was accepted by Soekarno. This made the military successfully occupy positions in government politics such as the cabinet, legislative body, and strategic positions. The impact of the presence of military groups in government politics is on the state of political stability in Indonesia. The military formed the Golkar Joint Secretariat to rival the PKI party. Whereas in the stability of Defense and security. The military has cut diplomatic ties with China.

Keywords: Goverment, Military, Politics

PENDAHULUAN

Keterlibatan militer dalam perpolitikan di Indonesia semakin terlihat saat terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa ini dipicu oleh konflik tersebut menjadi sorotan parlemen komisi pertahanan sehingga menjadi isu politik dengan munculnya mosi di parlemen yang menginginkan reorganisasi dalam tubuh militer. Oleh karena itu militer merasa urusannya terlalu dalam dicampuri oleh orang non-militer (sipil). Dengan demikian pada tanggal 17 Oktober 1952 para anggota militer melakukan demonstrasi di gedung parlemen. Demonstrasi dilakukan oleh sekitar 35.000 orang tentara kemudian bergerak ke istana presiden untuk menuntut pembubaran parlemen dan segera dilaksanakannya pemilihan umum. Hal ini merupakan awal keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia.

Kedudukan militer semakin kuat dalam politik pemerintahan setelah disahkannya UU Darurat Perang atau Staat van Oorlog (SOB) tahun 1957. SOB merupakan inisiatif dari KSAD A.H Nasution yang disetujui oleh presiden Soekarno. SOB diterapkan mengingat situasi dan kondisi negara kacau akibat aksi separatis yang terjadi di berbagai daerah seperti dibentuknya Dewan Banteng dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Pengesahan UU Darurat Perang atau SOB memberikan

kesempatan bagi kalangan militer untuk bertindak dan mendominasi kondisi pemerintahan Indonesia.

METODE

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschlak, 1985:32). Metode sejarah berguna untuk mengubah fakta sejarah menjadi cerita sejarah. Terdapat empat langkah penelitian, yaitu: (1) *heuristik*, (2) *kritik*, (3) *interpretasi*, dan (4) *historiografi*.

Langkah pertama, yaitu heuristik atau pengumpulan sumber. Peneliti mencari sumber-sumber dan berhasil menemukan artikel, buku, dan penelitian terdahulu. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku karya jenderal A.H Nasution (1952) yang berjudul Politik Militer Indonesia. Dikatakan sumber primer karena penulis sebagai pelaku yang secara langsung serta mengetahui bagaimana keadaan dan perkembangan politik pemerintahan di Indonesia (Gottschalk, 1985: 35).

Setelah mengumpulkan sumber-sumber sejarah, maka peneliti melakukan kritik sumber baik sumber primer maupun sekunder. (Sjamsudin, 2007:104). Dalam tahap ini, peneliti melakukan uji keabsahan tentang keaslian sumber dengan melakukan dua tahap kritik yaitu kritik ekstern dan kritik intern (Abdurahman, 2007: 68). Pada

kegiatan kritik intern untuk sumber dokumen peneliti melakukan pengujian atas keaslian sumber dengan menyeleksi secara fisik sumber yang telah diperoleh, menyelidiki jenis kertas, tinta dan gaya tulisan yang digunakan. Selain itu, peneliti juga menyelidiki tahun pembuatan sehingga sumber tersebut dapat dipastikan autentitasnya. Untuk kritik ekstern penulis menguji buku-buku serta jurnal-jurnal.

Langkah berikutnya yaitu interpretasi atau analisis fakta (Kuntowijoyo.1995:100). Yang artinya menguraikan sintesi atau menyatukan fakta agar memperoleh hubungan antara fakta yang satu dengan yang lain. dalam bukunya ada dua metode yang digunakan dalam interpretasi yaitu: analisis yang artinya menguraikan dan sintesis yang artinya menyatuhkan. Dalam penulisan skripsi ini setelah dilakukan kritik sumber, maka sumber tersebut di analisis secara teliti untuk mendapatkan data-data yang lebih spesifik, relevan dan terkait dengan masalah yang diteliti kemudian diklarifikasikan menurut jenisnya dan disintesis agar memperoleh hubungan antara data yang satu dengan yang lain.

Langkah terakhir yaitu tahapan historiografi/penyajian hasil interpretasi fakta dalam bentuk tulisan. Historiografi merupakan kegiatan merekonstruksi secara imajinatif dari masa lampau

berdasarkan data yang diperoleh (Gottschalk, 1985:32; Kuntowijoyo, 1994:89). Dalam bentuk penulisan yang utuh berupa skripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar belakang Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan Indonesia 1958-1998

Militer di Indonesia tidak hanya berfungsi dalam menjaga pertahanan dan keamanan bangsa atau negara (HanKam). Militer juga ikut berperan dalam bidang politik. Keterlibatan militer dalam bidang politik disebabkan oleh tiga faktor, yaitu peran militer dalam revolusi kemerdekaan Indonesia, Campur tangan sipil dalam tubuh militer, dan diterapkannya Undang-Undang Darurat Perang (S.O.B). Selanjutnya Ketiga faktor tersebut akan dijelaskan secara rinci dibawah ini.

Peran Militer Dalam Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945-1949

Peran militer dalam revolusi kemerdekaan menjadi legitimasi bagi militer untuk turut serta dalam menentukan haluan negara. Militer tidak hanya menjadi instrumen pertahanan bangsa dari gangguan kekuatan luar. Akan tetapi militer juga menjaga keamanan dari ancaman yang berasal dari dalam. Secara politis militer menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan politik

Indonesia. Militer berhasil mengatasi peristiwa politik ketika terjadi pemberontakan komunis di Madiun pada tahun 1948. Dengan berhasilnya mengatasi masalah ini semakin besarlah peranan militer dalam menentukan garis sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa militer juga berhasil menjaga kedaulatan bangsa Indonesia selama perang kemerdekaan (Revolusi Kemerdekaan) yang terjadi pada tahun 1945-1949. Militer menjadi lembaga nasional yang telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan berkesinambungan selama perang kemerdekaan. Militer mampu menangani berbagai peristiwa yang mendewasakannya tidak hanya dalam tugas pertahanan dan keamanan tetapi juga dalam menangani masalah-masalah politik, sosial, ekonomi, dan pemerintahan (Nugroho, 1984:149).

Reaksi terhadap Campur Tangan Sipil dalam Tubuh Militer

Campur tangan sipil dalam tubuh militer berawal dari konflik intern yang terjadi pada Angkatan Darat antara Kolonel Bambang Supeno dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) A.H. Nasution (Setiawan, Permatasari, & Kumalasari, 2018: 375). Parlemen menyorot konflik yang terjadi di Angkatan Darat akhirnya menjadi political issue di Parlemen. Zainul Baharuddin tokoh politik dari partai PNI

mengajukan mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan dan menghendaki diadakannya reformasi dan reorganisasi dalam tubuh militer. Nasution menganggap bahwa parlemen sudah terlalu dalam mencampuri urusan internal militer. Menurut Nasution para pemimpin politik tidak mampu mencapai pemecahan politik bagi masalah-masalah seperti konflik yang terjadi di dalam tubuh TNI khususnya Angkatan Darat (Sundhahussen, 1986: 119).

Akibatnya pada tanggal 17 Oktober 1952 militer melakukan demonstrasi besar-besaran digedung parlemen, demonstrasi dilakukan oleh sekitar 35.000 prajurit. Para demonstran bergerak menuju istana dengan menghadapkan moncong meriam kepada istana presiden. Para demonstran menuntut Presiden Soekarno agar segera melakukan pembubaran parlemen.

Diberlakukannya Undang-Undang Darurat Perang (S.O.B) 1957

Indonesia mengalami berbagai pergolakan pada tahun 1956. Pergolakan tersebut diantaranya Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda. Dewan Banteng dibentuk oleh beberapa tokoh militer yang berasal dari Sumatera Barat yang diketuai oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein. Dewan Gajah dibentuk di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan. Dewan Garuda dibentuk di Sumatera Selatan yang

dipimpin oleh Letkol Barlian. Pergolakan ini disebabkan oleh ketidakpuasan dengan tindakan pemerintahan pusat yang seolah-olah hanya mengabdikan pada kepentingan pulau Jawa saja (Sundhaussen. 1986:182).

Pergolakan daerah semakin mencapai puncaknya dengan gagalnya delegasi Indonesia di PBB pada bulan September 1957 dalam upaya merebut Irian Barat menambah kekecewaan luar Jawa terhadap Jawa (Pemerintah Pusat). Akibatnya daerah-daerah diluar pulau Jawa menganggap pemerintah pusat terlalu mengistimewakan pulau Jawa tidak memperhatikan kepentingan daerah. Sehingga menyebabkan rasa kecemburuan daerah-daerah terhadap pulau Jawa. Hal ini menimbulkan pergolakan di Sumatera dan Sulawesi yang bertujuan untuk melepaskan diri dari NKRI. Pemerintah mengalami kesulitan mengatasi keadaan Negara, sehingga untuk meredam pergolakan yang terjadi diberbagai daerah. Maka pemerintah pusat memberlakukan Undang-Undang Darurat Perang pada tanggal 14 Maret 1957. Undang-Undang Darurat Perang (S.O.B) menjadi landasan bagi militer untuk mengatur sekaligus menjalankan politik pemerintahan (Sundhaussen. 1986:184).

Bentuk Keterlibatan Militer Dalam Politik Pemerintahan Di Indonesia 1958-1998

Militer di Indonesia telah menempatkan dirinya sebagai kekuatan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara sekaligus kekuatan politik. Militer berpartisipasi dalam setiap kegiatan masyarakat dibidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Keterlibatan militer dalam pemerintahan tidak terlepas dari konsep “Jalan Tengah” yang digagas oleh Jenderal Nasution. Akibatnya militer berhasil menduduki kabinet, badan legislatif dan jabatan-jabatan yang strategis. Militer ikut mengawasi setiap kegiatan pemilu serta menjadi kontrol atas proses perpolitikan di Indonesia. Konsep Jalan Tengah Nasution dan wujud keterlibatan militer dalam politik pemerintahan lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini.

Konsep Jalan Tengah Nasution sebagai Dasar Pijakan Militer Terjun dalam Dunia Politik.

Konsep jalan tengah merupakan konsep yang merangkum secara kumulatif perkembangan orientasi, nilai dan keterlibatan militer dibidang pertahanan dan keamanan serta sosial politik. Konsep ini diambil oleh Nasution karena tidak menginginkan tentara Indonesia seperti prajurit Amerika Latin yang menjadi kekuatan politik serta tidak mau meniru model prajurit Eropa yang hanya menjadi alat mati pemerintah (Nasution: 1983: 23). Nasution menggagas konsep jalan tengah

karena merasa militer telah berjasa dalam Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Militer juga berhasil meredamkan pergolakan yang bersifat kedaerahan pada masa diberlakukannya Undang-Undang Darurat Perang (S.O.B) pada tahun 1957. Oleh karena itu Nasution beranggapan bahwa militer berhak untuk berpartisipasi dalam politik pemerintahan.

Konsep atau gagasan Nasution kemudian diusulkan kepada Presiden Soekarno untuk diterapkan di Indonesia. Disisi lain Presiden Soekarno membutuhkan kekuatan militer untuk mencapai keinginannya menerapkan demokrasi terpimpin. Soekarno beranggapan bahwa jika menggandeng militer maka keinginannya untuk menerapkan demokrasi terpimpin bisa tercapai dengan mudah (Feith. 1995: 54). Oleh karena itu Soekarno menerima konsepsi Nasution mengenai jalan tengah. Hal ini nantinya menjadi dasar pijakan bagi militer untuk ikut serta dalam politik pemerintahan di Indonesia

Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan tahun 1959-1965

Pada masa transisi di dalam kehidupan politik di Indonesia terjadi pada. 1959. Jenderal A.H. Nasution menitik beratkan usahanya untuk mendapatkan legitimasi atau “dasar hukum” bagi militer untuk melakukan peranan-peranan politik yang selama ini

belum dimiliki. Usaha yang dilakukan ialah dengan mengusulkan gagasan mengenai Konsep “Jalan Tengah”. Dalam konsep jalan tengah dijelaskan perlunya militer untuk turut secara aktif melaksanakan peranannya diluar bidang militer. Dengan kata lain militer dapat melakukan peranannya dalam bidang politik pemerintahan. Diantaranya didalam kabinet, badan legislatif, dan jabatan-jabatan strategis seperti kepala daerah maupun badan-badan usaha yang dikelola oleh negara.

1. Kabinet

Soekarno membentuk kabinet kerja pada 10 juli 1959 akan tetapi pada awal dibentuknya kabinet kerja ini militer yang merangkap jabatan duduk dalam kabinet hanyalah Jenderal A.H Nasution yakni sebagai Menteri Pertahanan sekaligus sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada tahun 1959 (Wardaya, 1984: 34). Militer baru banyak menduduki kursi dalam kabinet pada saat dibentuknya kabinet Dwikora I dengan masa kerja 27 Agustus 1964 sampai 22 Februari 1966. Dari seluruh jumlah anggota kabinet Dwikora I dapat dijumlahkan bahwa 30% anggota kabinet berasal dari golongan militer.

2. Badan Legislatif

Kehadiran golongan militer dalam pemerintahan seperti didalam bidang legislatif merupakan hasil dari diusulkanya gagasan atau konsep

Nasution pada Presiden Soekarno tahun 1957. Gagasan ini memungkinkan bagi golongan militer untuk ikut terlibat dalam pemeritahan (Karim. 1989: 39). Selain itu, Presiden Soekarno juga membutuhkan militer didalam pemerintahannya agar stabilitas nasional dapat terjaga. Mengingat banyak terjadinya gerakan separatis yang mengancam keutuhan NKRI. Oleh karena itu Presiden Soekarno melibatkan militer dalam politik pemerintahannya. Sehingga dapat terlihat golongan-golongan militer yang menduduki kursi politik dalam pemerintahan. Seperti halnya dalam badan legislatif yang jumlah golongan militernya pada tahun 1964 masa pemerintahan Soekarno berjumlah 18% (2 orang) yakni Mayjen TNI Wilujo Puspojudo sebagai wakil ketua MPRS, dan Laksda (Laut) Mursalin Daeng sebagai wakil ketua DPR-GR.

3. Jabatan Strategis

Hadirnya militer dalam perusahaan yang dikelola negara tidak terlepas dari perannya yang membantu pemerintah untuk menasionalisasikan aset (perusahaan milik Belanda). Karena pada saat itu kaum serikat buruh melakukan aksi-aksi pengambilan perusahaan milik Belanda. Pemerintah akhirnya menyetujui militer khususnya Angkatan Darat untuk bergerak mengamankan

aset milik Belanda. Pada 13 Desember 1957, KSAD Mayor Jenderal Nasution mengumumkan perintah penertiban pengambilalihan. Pada saat itu buruh atau kelompok masyarakat secara resmi dilarang melakukan pengambilalihan aset. Oleh karena itu militer banyak melakukan perannya dalam proses nasionalisasi aset. Sehingga militer banyak menempati jabatan-jabatan perusahaan yang dikelola negara. Salah satu golongan militer yang berhasil menduduki jabatan strategis ialah Ibnu Sutowo yang menduduki direktur utama Permina.

Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan tahun 1966-1998

Kedudukan militer dalam politik pemerintahan pada masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru) semakin kuat setelah dikembangkannya konsep Nasution menjadi doktrin DwiFungsi ABRI. Hal ini dapat dilihat dari peranan militer didalam susunan kabinet, badan legislatif, dan jabatan-jabatan strategis seperti kepala daerah (Gubernur) serta badan-badan usaha milik negara (BUMN). Wujud keterlibatan militer dalam politik pemerintahan pada masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru) akan dijelaskan dibawah ini.

1. Kabinet

Peranan menteri dalam kabinet pada masa pemerintahan Soeharto

(Orde Baru) yakni kabinet Pembangunan tidak jauh beda dengan kabinet Dwikora pada masa pemerintahan Soekarno. Susunan menteri dalam kabinet pembangunan juga terisi dari golongan-golongan militer. Salah satunya ialah Mayjen TNI Basuki Rahmat yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Sebelum diangkat menjadi menteri oleh Soeharto Mayjen Basuki Rahmat merupakan Jenderal TNI yang menjadi saksi penandatanganan Supersemar. Setelah Soekarno menandatangani Surat perintah tersebut, Basuki dipercaya untuk membawa surat keputusan dan diperintahkan untuk menyampaikannya pada Soeharto. Beberapa hari setelah Supersemar keluar tepatnya pada tanggal 28 maret 1966 Basuki Rahmat diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri oleh Soeharto.

2. Badan Legislatif

Keikutsertaan militer dalam bidang politik secara umum bersifat antipartai. Militer percaya bahwa mereka merupakan pihak yang setia kepada modernisasi dan pembangunan. Sedangkan partai politik dipandang memiliki kepentingan-kepentingan golongan tersendiri. Keterlibatan militer di sektor eksekutif sangat nyata terutama melalui Golkar. Hubungan militer dan Golkar disebut sebagai

hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Contohnya pada Munas I Golkar di Surabaya (4-9 September 1973). Militer mampu menempatkan perwira aktif ke dalam Dewan Pengurus Pusat. Selain itu, hampir di seluruh daerah tingkat I dan daerah tingkat II jabatan Ketua Golkar dipegang oleh ABRI aktif. Selain itu, terpilihnya Sudharmono sebagai wakil militer pada pucuk pemimpin Golkar (pada Munas III) juga menandakan bahwa Golkar masih di bawah kendali militer. Selain dalam sektor eksekutif, militer dalam bidang politik juga terlibat dalam sektor legislatif. Meskipun militer bukan kekuatan politik yang ikut serta dalam pemilihan umum, mereka tetap memiliki wakil dalam DPR dan MPR.

3. Jabatan Strategis

Pada zaman Orde Baru bukan hal yang aneh jika ada tokoh militer aktif yang menjabat sebagai kepala daerah seperti gubernur. Tak hanya di sektor politik dan pemerintahan. Militer juga berkecimpung di lembaga atau perusahaan milik negara, peradilan, bahkan di ranah bisnis sebagai tentara merangkap pengusaha (Sjamsuddin, 1991:129). Soeharto yang telah menjabat Presiden menginginkan adanya penggunaan program pemerintah yang efektif untuk diterapkan diseluruh wilayah tanpa diselewengkan oleh organisasinya,

maka diperlukanlah suatu organisasi yang efektif dan tanggap terhadap pimpinan pejabat eksekutif. Usaha memasukkan militer ke dalam organisasi dirasa tepat dan paling strategis untuk dilakukan, karena akan menciptakan peluang kelangsungan kekuasaan. Jabatan strategis yang diduduki oleh militer pada masa pemerintahan Soeharto menduduki badan khusus yang dibentuk oleh negara seperti badan rahasia atau badan intelijen dan Badan Usaha Milik Negara.

Dampak Keterlibatan Militer Terhadap Stabilitas Politik Pemerintahan dan Pertahanan Keamanan di Indonesia 1958-1998

Kehadiran golongan militer pada politik pemerintahan di Indonesia berdampak pada dua hal yaitu stabilitas politik pemerintahan Indonesia dan stabilitas pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Dampak keterlibatan militer terhadap stabilitas politik dan pertahanan keamanan Indonesia lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini.

Stabilitas Politik Pemerintahan

1. Politik Dalam Negeri

Kedudukan militer dalam organisasi Sekber Golkar diperbolehkan mengikuti pemilu 1971 berdasarkan ketentuan Undang-Undang pemilu 1969. Seperti halnya

dengan partai-partai politik lainnya yang telah mempunyai wakilnya dalam Badan Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sejak awal pemerintahan Soeharto, Sekber Golkar telah membuktikan sebagai partner terpercaya bagi militer. Menjelang pemilu 1971, Sekber Golkar ikut maju dalam pemilu dibawah satu tanda gambar "Beringin" dengan nama Golongan Karya (Golkar). Pada saat pemilu 1971 militer memberikan dukungan pada Golkar di pusat maupun di daerah yang pada waktu itu pimpinan banyak yang dijabat oleh perwira-perwira militer. Hasilnya Golkar keluar sebagai pemenang dari pemilu tahun 1971 sampai dengan pemilu tahun 1997 (Soebijono. 1997: 186).

2. Politik Luar Negeri

Arah kebijakan politik dan diplomasi Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno (Orde Lama) lebih ditujukan untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi dan menentang segala bentuk penjajahan. Kebijakan politik luar negeri Indonesia terus berusaha memainkan peranannya sesuai dengan prinsip idealnya yang bebas aktif. Sebagai contoh yaitu dalam usaha mencapai perdamaian dunia ketika terjadi ketegangan antara dua negara super power (Uni Soviet dan Amerika Serikat) Presiden Soekarno

melancarkan politik bebas aktifnya dengan tidak memihak salah satu blok. Kebijakan politik Indonesia yang sesuai dengan prinsip bebas aktifnya menghadapi ujian pada tahun 1952. Diketahui menteri luar negeri Achmad Subardjo mengadakan perjanjian bantuan militer dengan Amerika Serikat yang merupakan salah satu negara super power. Akibatnya, Indonesia harus menaati ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dengan Amerika. Dengan kata lain Indonesia telah melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip politik luar negeri yang bebas aktif (Kasenda, 2014: 178).

Kebijakan politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan pada masa pergantian kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto. Salah satu perubahan pada masa Soeharto ialah pemutusan hubungan diplomatik dengan Cina. Kebijakan yang diambil Indonesia untuk melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Cina disebabkan oleh pandangan militer (antikomunis). Militer memandang Cina sebagai pihak yang dianggap turut terlibat dalam peristiwa G30S (Suryadinata, 1998: 39).

Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Masuknya militer dalam politik pemerintahan menandakan bahwa militer telah memiliki dua fungsi yaitu

menjaga kestabilan Pertahanan dan Keamanan (HanKam), serta fungsi sosial politiknya. Hal ini dapat membuat profesionalisme militer menurun. Akan tetapi militer tetap menjalankan fungsi utamanya untuk menjaga Pertahanan dan Keamanan negara (Kardiyat, 2011: 78). Di dalam negeri militer berhasil menumpas berbagai pemberontakan-pemberontakan yang bersifat kedaerahan. Seperti pemberontakan Dewan-dewan di Sumatera, PRRI, dan Permesta di era Soekarno. Selain itu militer juga berhasil menumpas Pemberontakan G30S. Diluar negeri peran militer dalam menjaga kestabilan nasional ialah dengan melakukan pemulihan hubungan diplomatik dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

PENUTUP

Kesimpulan

Latar Belakang keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia pada tahun 1958-1998 disebabkan oleh tiga faktor, yaitu (1) Militer berjasa dalam revolusi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945-1949, (2) adanya campur tangan sipil dalam tubuh militer pada tahun 1952, (3) diberlakukannya Undang-Undang Darurat Perang (S.O.B) pada tahun 1957. Faktor tersebut yang menjadi dasar militer untuk ikut terlibat dalam politik pemerintahan Indonesia. Terlebih ketika Presiden Soekarno

menetapkan S.O.B guna meredakan gejolak yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Hal ini membuat militer secara langsung mengatur sekaligus menjalankan politik pemerintahan di Indonesia.

Keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia semakin terlihat ketika konsep Nasution mengenai "Jalan Tengah" diterima oleh Presiden Soekarno. Konsep Nasution menjadi dasar pijakan militer untuk ikut berpartisipasi dalam politik pemerintahan Indonesia. Keterlibatan militer dalam politik pemerintahan dibagi menjadi 2 periode yaitu demokrasi terpimpin pada masa Pemerintahan Soekarno pada tahun 1959 hingga tahun 1965, dan pada masa Orde Baru masa Pemerintahan Soeharto pada tahun 1966 hingga tahun 1998. Dari kedua periode itu militer masuk dalam politik pemerintahan menempati jabatan pada kabinet-kabinet, badan legislatif, serta jabatan-jabatan strategis di Indonesia.

Dampak keterlibatan militer terhadap pemerintahan di Indonesia pada tahun 1958-1998 berdampak pada keadaan politik dalam negeri maupun politik luar negeri Indonesia. Keadaan politik dalam negeri pada waktu itu dapat dikatakan stabil karena Indonesia berhasil menjalankan demokrasi dengan dibuktikannya pemilu 1971-1997 yang dapat terselenggara. Pemilu 1971 sampai 1992 dimenangkan oleh Golkar. Hal ini

menandakan militer telah berhasil dalam pembangunan dan stabilitas nasional. Keadaan politik luar negeri Indonesia memainkan peranannya sesuai dengan prinsip idealnya yang bebas aktif. Yaitu dengan tidak memihak salah satu blok (netral) Namun tetap berperan aktif dalam pergaulan Internasional. Indonesia pada masa Soeharto mengambil kebijakan politik dengan memutuskan hubungan diplomasi dengan Cina pada tahun 1967. Kebijakan ini diambil karena adanya dugaan Cina terlibat dalam usaha kudeta dalam peristiwa G30S.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, D. (2007). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Feith, H. (1995). *Soekarno dan Militer dalam Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Gottschalk, L. (1985). *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Kasenda, P. (2014). *Bung Karno Panglima Revolusi*. Yogyakarta: Galang Pustaka.
- Kardiyat, A. Wiharyanto. (2011). *Sejarah Indonesia: Dari Proklamasi sampai Pemilu 2009*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: PT. Bentang Pustaka.
- Nasution A. H. (1983). *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid III*. Jakarta: Gunung Agung.
- Nasution, A. H. (1954). *Politik Militer Indonesia*. Djakarta: Petjetakan Perdana.

- Notosusanto, N. (1985). *Pejuang dan Prajurit, Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Setiawan, J., Permatasari, W.I. & Kumalasari, D. (2018). Sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950-1959. *Historia: Jurnal rogram Studi Pendidikan Sejarah*, 6 (2), 365-378.
- Sjamsudin, H. (1996). *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Soebijono., dkk. (1992). *Dwifungsi ABRI*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sukma, R. (1999). *Hubungan Sipil-Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Sundhahussen, ULF. (1986). *Politik Militer Indonesia 1945-1967*. Jakarta: LP3ES.
- Suryadinata, L. (1998). *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Suharto*. Jakarta: LP3ES